

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republic of Fiji atau Fiji bukanlah suatu negara yang besar, luas negaranya sekitar 18.500 km², kalau dibandingkan hanya setara dengan Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat¹. Fiji merupakan kepulauan (sekitar 840 pulau), yang terletak di zone pertemuan antara Melanesia dan Polinesia. Penduduk didominasi oleh orang India (48,2%) dan pribumi Fiji (46,2%) dan kelompok minoritas yaitu orang Eropa, Rotumas dan Cina². Untuk negara seukuran itu, Fiji mempunyai kemampuan Angkatan Bersenjata yang cukup berarti, dan telah menjadi penyumbang besar dalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di berbagai belahan dunia.

Pada tahun 1874, kepulauan ini jatuh ke tangan Britania Raya sebagai koloni. Pada pemerintahan Gubernur Sir Arthur Hamilton-Gordon tahun 1876 mengeluarkan kebijakan yaitu melarang penjualan atas tanah kepada masyarakat non pribumi Fiji, yang pada saat itu sekitar 83% dari daratan Fiji dimiliki oleh pribumi Fiji. Kebijakan ini terus berlanjut dan susah untuk dimodifikasikan. Penguasa kolonial kemudian membangun ekonomi gula (60% ekspor) dan di tahun 1878 kolonialis Inggris mengimpor tenaga kerja dari India untuk mengelola perkebunan tebu³. Efek dari imigrasi ini menciptakan suatu polarisasi kesukuan yang telah membuktikan secara kultural dan politis menantang ke arah Fiji

¹ Majalah Angkasa, edisi koleksi, *kudeta, Gerakan Ilegal Merebut Kekuasaan*, 2007

² Nohlen, Dieter, *Kamus Dunia Ketiga*, Grasindo, Jakarta, 1994, hal 186

³ *ibid*

modern yang kemudian dikenal dengan sebutan etnis Indo Fiji, etnis ini tidak diberikan hak kepemilikan atas tanah oleh pemerintahan Fiji⁴. Namun etnis Indo Fiji memproduksi lebih dari 90% gula dan mendominasi industri gula serta pariwisata yang menjadi andalan ekonomi Fiji dan populasi mereka berkembang mencapai 44% dari seluruh populasi Fiji⁵.

Di tahun 1970, Fiji mendapatkan kemerdekaannya dan bergabung menjadi anggota negara persemakmuran yang menganut sistem pemerintahan republik demokratik parlemen representatif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, Presiden sebagai kepala negara dengan sistem multi partai.

Setelah mendapatkan kemerdekaannya, pemerintahan kemudian di dominasi oleh Ratu Kamisese Mara dari Alliance Party yang mendapat dukungan dari pemimpin tradisional Fiji. National Federation Party (NFP) yang merupakan partai saingan Alliance Party dalam parlemen, adalah perwakilan dari masyarakat Indo Fiji. Dalam pemilu pertama pada bulan Maret 1977, NFP memenangkan suara mayoritas, tapi pemerintahan tersebut mengalami kegagalan karena masalah internal, yaitu masyarakat asli Fiji tidak menerima kepemimpinan dari etnis Indo Fiji, selain itu krisis konstitusi mulai berkembang⁶.

NFP kemudian memisahkan diri dari pertikaian tersebut tiga hari setelah pemilu dilakukan. Dalam gerakan yang kontroversial, Gubernur Jendral Ratu Sir George Cakobau dipanggil oleh Kamisese Mara untuk membentuk pemerintahan sementara agar lebih fokus mengatasi masalah etnis dan menunda pemilu kedua.

⁴ Ibid, hal 187

⁵ Ibid,

⁶ <http://en.wikipedia.org/wiki/National-Federation-Party/28-11-07>

Di bulan September di tahun yang sama, pemilu kedua dilaksanakan dan Kamisese Mara dari Alliance Party memenangkan 36 kursi parlemen dari 52 kursi yang disediakan. Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1982, Mara hanya memperoleh kursi sebanyak 28 dari 52 kursi⁷. Mara kemudian mengajak National Federation Party berkoalisi, tetapi pemimpin partai NFP menolak hal tersebut.

Di bulan April 1987, Fiji Labour Party pimpinan Dr. Timoci Bavadra, dari etnis Fiji yang tidak mendapat dukungan dari komunitas etnis Indo-Fiji, memenangkan pemilu dan baru kali ini Fiji dipimpin oleh pemimpin yang berasal dari komunitas etnis Fiji. Timoci Bavadra kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri⁸.

Pemerintahan yang demokratis mengalami interupsi oleh kudeta yang terjadi pada 14 Mei 1987⁹. Kudeta pertama ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Sitiveni Rabuka, ia memimpin pasukan militernya masuk ke dalam gedung parlemen dan menggulingkan pemerintahan Timoci Bavadra. Kudeta ini disebabkan oleh keprihatinan yang menyatakan bahwa pemerintah di dominasi oleh komunitas Indo-Fiji.

Rabuka yang tergabung dalam Fijian Political Party (*Soqosoqo Vakavuleva ni Taukei*), kemudian menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Gubernur Jendral Ratu Sir Penaia Ganilau, yang diharapkan bisa melaksanakan kepentingan etnis Fiji. Ganilau mencoba untuk mengembalikan lagi konstitusi yang dibatalkan. Namun, Rabuka kembali melancarkan kudeta kedua pada 25 September 1987¹⁰.

⁷<http://en.wikipedia.org/wiki/National-Federation-Party/28-11-07>

⁸<http://en.wikipedia.org/wiki/Fiji-Labour-Party/28-11-07>

⁹ ibid

¹⁰ Nohlen, Dieter, *Kamus Dunia Ketiga*, Grasindo, Jakarta, 1994, hal 186-187

Rabuka kemudian membentuk pemerintahan sementara pada 5 Desember, dan mengangkat Kamisese Mara sebagai Perdana Menteri dan Ganilau sebagai Presiden. Rabuka kemudian mendeklarasikan Fiji sebagai Negara Republik.

Pemerintahan kemudian menyusun konstitusi baru yang disahkan pada bulan Juli 1990. Dalam konstitusi tersebut, menyebutkan bahwa kursi legislatif diberikan lebih banyak kepada etnis Fiji (penduduk pribumi). Berdasarkan data statistik tahun 1989, sejak tahun 1946 populasi penduduk Fiji dihuni oleh mayoritas etnis Fiji¹¹. Konstitusi 1990 ini menjamin etnis Fiji kekuasaan atas Fiji. Dengan diberlakukannya konstitusi tersebut, lebih dari 12.000 etnis Indo-Fiji dan etnis minoritas lainnya meninggalkan Fiji¹². Terjadinya emigrasi besar-besaran ini menyebabkan kesulitan ekonomi.

Banyak kontroversi politik Fiji yang berhubungan dengan masalah etnis yang merupakan karakteristik politik Fiji. Fiji adalah sebuah negara unik di dunia yang menjadikan populasi besar yang berbasis ras, salah satunya adalah masalah kepemilikan atas tanah.

Sampai tahun 1995-1996 konflik atas tanah ini semakin memanas, setelah etnis Indo Fiji memperbaharui sewa atas tanah. sewa atas tanah biasanya untuk 10 tahun. Banyak etnis Indo Fiji menganggap bahwa kondisi ini tidak memberikan cukup keamanan dan mereka telah mendesak untuk memperbaharui sewa untuk 30 tahun, sedangkan banyak etnis Fiji takut jika pemerintahan Indo Fiji akan mengambil alih kontrol atas tanah¹³.

¹¹ *ibid*

¹² *Ibid*, hal 189

¹³ *ibid*

Komisi konstitusi kemudian mengkaji kembali susunan konstitusi, dan mereformasi konstitusi dan disetujui pada bulan Juli 1997 yang memberikan kesetaraan hak antara etnis Fiji dan etnis Indo Fiji. Fiji kemudian bergabung kembali menjadi anggota Persemakmuran di bulan Oktober. Pemilu pertama diselenggarakan di bawah konstitusi baru pada bulan Mei 1999. Partai koalisi Rabuka dikalahkan oleh gabungan Partai Indo-Fiji yang dipimpin oleh Mahendra Chaudry, yang kemudian menjadi Perdana Menteri pertama yang berasal dari etnis Indo-Fiji.

Di bulan Mei 2000, sebuah kudeta yang dipimpin oleh George Speight atau Ilikimi Naitini, seorang nasionalis Fiji garis keras adalah seorang pengusaha keturunan etnis Fiji dan campuran Eropa, bergabung dengan para pendukungnya orang-orang bersenjata ilegal yang menentang dominasi masyarakat India di Kepulauan Fiji¹⁴.

Perdana Menteri Mahendra Chaudry dan anggota parlemennya disandera kelompok bersenjata. Speight mengklaim bahwa etnis Indo-Fiji merongrong hak-hak pribumi Fiji yang kemudian mendeklarasikan konstitusi baru yang mengarahkan pada pembatalan dan pengosongan hak-hak politik etnis Indo Fiji. Speight kemudian memecat Perdana Menteri Fiji, Mahendra Chaudry dan Presiden Kamisese Mara, dan Speight mengambil sumpah sebagai Perdana Menteri dan memproklamkan Ratu Jope Seniloli sebagai Presiden.

Frank Bainimarama yang saat itu sebagai pemimpin militer turun tangan untuk menetralkan keadaan, dan mengeluarkan kebijakan untuk menangkap para

¹⁴ <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2000/05/22/2002.html/20-02-08>

pelaku kudeta ini, Speight kemudian ditahan di penjara di pulau Nukulau di lepas pantai Suva. Speight ditahan atas tuduhan pengkhianatan yang berkaitan dengan penyerangan terhadap parlemen dan penyanderaan Perdana Menteri Mahendra Chaudry¹⁵.

Tetapi Kamisese Mara menentang penggulingan kekuasaan yang dilakukan oleh Speight. Frank Bainimarama meminta Mara untuk mengundurkan diri, yang sepertinya lebih mengarah pada pemaksaan pengunduran diri. Dan akhirnya Mara mengundurkan diri pada tanggal 29 Mei 2000. Tindakan Frank ini dalam dunia politik disebut juga sebagai “perebutan kekuasaan di dalam perebutan kekuasaan”¹⁶.

Demokrasi kemudian dipulihkan kembali menjelang akhir 2000, dan militer melantik mantan Bankir, Laisenia Qarase sebagai Perdana Menteri sementara¹⁷. Qarase berasal dari etnis Fiji yang dipilih untuk mengatasi masalah krisis politik dan memperbaiki hubungan dengan luar negeri. Walaupun Qarase ditunjuk oleh militer menjadi Perdana Menteri, Qarase akan membentuk pemerintahan demokratis yang lepas dari pengaruh militer.

Dampak dari kudeta 2000 menyebabkan keanggotaan Fiji di Persemakmuran dikenai sanksi karena kegiatan-kegiatan yang anti demokratis. Kudeta militer sebagai metode perebutan kekuasaan praktis tidak mendapatkan dukungan lagi secara internasional. Kudeta militer yang mengandalkan kekuatan fisik dianggap sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang menekankan

¹⁵ http://en.wikipedia.org/wiki/George_Speight/fiji_coup_of_2000/11-01-08

¹⁶ http://en.wikipedia.org/wiki/Frank-Bainimarama/personal_live/11-01-08

¹⁷ ibid

demokratisasi. Hanya sedikit negara di dunia yang diperintah oleh junta militer, seperti Myanmar, Thailand, Pakistan.

Secara umum, junta itu mendapat kecaman masyarakat internasional. Dan pengalaman menyadarkan banyak negara akan dampak buruk kudeta yang apapun alasannya yang kemudian menjurus pada ambisi untuk merebut kekuasaan. Di setiap negara dan kawasan kini berjuang, meski sering dengan susah payah untuk mendorong proses demokratisasi. Walaupun demokrasi sendiri bukanlah satu-satunya cara yang dapat memberikan kemakmuran kepada rakyatnya.

Pada tahun 2001, pemerintahan sementara Qarase dilantik sebagai pemimpin pemerintahan yang baru di Fiji, setelah melewati sebuah pemilihan umum yang demokratis. Partai koalisi yang dipimpin Qarase, yaitu Soqosoqo Duavata Ni Lewenivanua (SDL) memperoleh 31 kursi dari 71 kursi di parlemen¹⁸. Qarase kemudian membentuk susunan kabinet yang didominasi oleh komunitas etnis Fiji yang merupakan anggota dari Soqosoqo Duavata ni Lewenivanua dan menitikberatkan pada perbaikan ekonomi yang mengalami keterpurukan dan menyusun ulang konstitusi baru. Pada Pemilu 6 Mei 2006, Partai SDL kembali memperoleh kemenangan dengan 36 kursi dari 71 kursi.

Pada Agustus 2005, Qarase memperkenalkan undang-undang tentang rekonsiliasi atau perdamaian, toleransi dan persatuan, yang diarahkan pada para pendukung kudeta, termasuk George Speight, pelaku kudeta 2000. Namun Qarase dihadapkan pada kritik dan ancaman dari pihak militer. Frank Bainimarama telah berulang kali masuk dalam gelanggang politik untuk mengkritik kebijakan

¹⁸ www.voanews.com/indonesian/archieve/2001-09/11-01-08

pemerintah, khususnya pada pengampunan para pelaku kudeta dan kebijakan kontroversi lainnya. Dan hal ini telah merenggangkan hubungan dengan rezim yang berkuasa, dan membuat beberapa politisi lain menuduhnya ikut campur dalam urusan politik.

Qarase merespon ancaman dan berkonsultasi dengan Mahkamah Agung untuk menahan pihak militer agar tidak ikut campur dalam masalah politik. Namun, ancaman pihak militer berujung pada sebuah kudeta. Tetapi perselisihan paham dengan pihak militer terus berlanjut, yang berakhir dengan pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada 5 Desember 2006.

Pasukan militer yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Bersenjata, Komodor Frank Bainimarama atau Josaia Voreqe Bainimarama melucuti semua persenjataan para pengawal presiden dan menteri yang pada saat itu tengah berkunjung ke Provinsi Naitasiri, sebelah timur laut ibu kota Fiji, Suva, serta memblokade jalan-jalan menuju ibu kota Fiji. Bainimarama mengatakan dalam pidatonya di televisi bahwa dia kini memegang wewenang eksekutif dan mencopot Perdana Menteri Qarase.

Penguasa militer Fiji yang melakukan kudeta tidak berdarah memutuskan untuk mengasingkan Perdana Menteri Laisenia Qarase di kampung halamannya, kepulauan Lau, Fiji timurlaut, yang sebelumnya menjadi tahanan rumah sewaktu pasukan memasang barikade di rumahnya di ibukota Suva. Bainimarama memperingatkan bahwa lebih banyak pasukan akan dikerahkan ke jalan-jalan di Fiji namun tidak ada larangan keluar dan ia mendesak agar warga tidak diintimidasi.

Bainimarama tampil sebagai penguasa tunggal Fiji yang kemudian membentuk kabinet sementara yang beranggotakan 13 orang¹⁹, mengangkat Ratu Josefa Iloilo sebagai Presiden dan menunjuk Jona Senilagakali sebagai Perdana Menteri pada 5 Desember 2006. Jona Senilagakali menjabat sebagai Perdana Menteri dari tanggal 5 Desember 2006 – 4 Januari 2007, karena Presiden Fiji kemudian secara formal mengangkat Bainimarama sebagai Perdana Menteri pada 5 Januari 2007.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, muncul suatu permasalahan yang dijadikan sebagai fokus masalah, yaitu: mengapa kudeta militer menjadi pola keteraturan yang berulang sebagai alternatif solusi krisis politik di Fiji?

C. Kerangka Dasar Teori

Berkaitan dengan penggunaan teori dalam menjelaskan fenomena keterlibatan militer dalam politik, di sini penulis menggunakan teori peran militer dan politik.

Teori Peran Militer dan Politik

Dalam telaah mengenai intervensi militer dalam politik di beberapa negara, Samuel P. Huntington berasumsi bahwa: intervensi militer dalam politik disebabkan oleh “*the absence of effective political institutions capable of*

¹⁹ Majalah Angkasa, Edisi Koleksi, *Kudeta Gerakan Ilegal Merebut Kekuasaan*, 2007, hal 65

mediating, refining, and moderating group political actions” (tidak adanya kemampuan institusi/lembaga politik yang efektif dalam menengahi/menghubungkan, memperbaiki/menyaring, dan melunakkan aksi-aksi kelompok politik)²⁰.

Asumsi tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam sebuah sistem politik selalu terjadi berbagai macam tuntutan dari berbagai kekuatan politik dan tidak semuanya dapat dipenuhi karena terbatasnya kemampuan untuk memenuhi, sehingga harus ada lembaga yang:

1. Menghubungkan tindakan-tindakan berbagai kekuatan politik yang ada.
2. Menyaring berbagai tuntutan yang masuk (memisahkan antara tuntutan yang perlu diangkat menjadi isu politik atau yang dikesampingkan).
3. Melunakkan tuntutan yang ekstrim.

Menurut Huntington, dalam sistem politik fungsi ini mestinya dijalankan oleh institusi politik yang kuat. Militer dapat melakukan intervensi politik karena ketiadaan partai politik yang efektif. Huntington menganggap intervensi militer pada hakekatnya hanya menyalahi etika militer sebagai militer profesional dan merupakan sebuah tanda adanya *political decay* (pembusukan politik)²¹. Dalam menjelaskan argumen tersebut, Huntington membagi militer menjadi dua model, yaitu :

1. Militer profesional, yaitu militer yang menjunjung tinggi semangat korporasi, profesionalisme keterampilan dalam menguasai senjata dan ideologi nasionalisme.

²⁰ Perlmutter, Amos, *Militer dan Politik*, Rajawali, Jakarta, 1984, hal ix

²¹ *Ibid*, hal 185

2. Militer pretorian, yaitu militer yang aktif dalam politik. Dalam militer pretorian ada yang pada dasarnya berorientasi sipil dan akhirnya ingin kembali ke tugas sipil yang oleh Huntington disebut sebagai satu-satunya alternatif untuk mencegah kekacauan dan hanya dirinyalah yang paling pantas untuk memerintah dan Huntington menyebutnya sebagai *ruler army*.

Dari teori diatas sudah menggambarkan bahwa pihak militer melakukan intervensi politik karena ketiadaan institusi politik Fiji yang efektif. Partai politik merupakan salah satu institusi politik dalam banyak masyarakat majemuk etnik cenderung berdasarkan pada kelompok etnik tertentu dan tujuannya adalah untuk bersama-sama memerintah negara dengan suatu cara yang memberikan semua kesempatan untuk ambil bagian²².

Partai politik Fiji meskipun secara resmi merupakan partai politik multi ras dan di klaim sebagai perwakilan dari semua penduduk pulau Fiji agar tercipta pemerintahan yang multi etnik, namun pada kenyataannya partai politik yang dibentuk berdasarkan pada kelompok etnis tertentu sehingga anggota yang duduk dalam pemerintahan biasanya didominasi oleh etnis yang sama. Kadang tak satu pun dari partai politik bisa memperoleh suara mayoritas dalam pemilihan, karena itu partai politik Fiji harus berkoalisi dengan partai lain untuk memperkuat posisi mereka. Sistem pemilu adalah sebagai alat terkuat untuk mempengaruhi sistem politik. Sistem pemilu Fiji tidak ideologis

²² Reilly, Ben, *Constitutional Engineering and the Alternative Vote in Fiji*, National Centre for Development studies, Canberra, 1997, hal 209

tapi lebih mengarah pada etnis atau kesukuan. Pemilih biasanya memberikan suara berdasarkan pada kesamaan garis etnis.

Selain partai politik, parlemen adalah salah satu institusi politik. Parlemen Fiji biasanya beranggotakan orang-orang dari partai politik yang memenangkan kursi dalam pemilihan. Karena parlemen Fiji memiliki kekuasaan untuk membentuk ketentuan hukum sesuai dengan konstitusi, sehingga ada kekhawatiran dari pribumi Fiji apabila etnis Indo Fiji yang memenangkan pemilihan. Penguasaan Parlemen secara mayoritas mutlak oleh partai politik yang didukung warga keturunan India dikhawatirkan akan dapat mengubah ketentuan konstitusional misalnya tentang kepemilikan tanah.

Kabinet Fiji mengikuti sistem barat, dimana kekuasaan eksekutif diberikan kepada presiden, namun dalam prakteknya kekuasaan eksekutif berada di tangan menteri kabinet, dan kepresidenan ditangan perdana menteri. Menteri kabinet dibentuk oleh presiden dimana setiap partai politik yang memperoleh 8 kursi dalam 71 anggota parlemen harus diberikan posisi dalam kabinet. Namun dalam prakteknya, peraturan ini tidak pernah diimplementasikan. Seperti di tahun 1999, Chaudry menolak untuk memberikan posisi kementrian kepada Fijian Political Party, dan mengatakan bahwa permintaan tersebut tidak dapat diterima. Hal yang sama terjadi dari tahun 2001 sampai 2004, perdana menteri Laisenia Qarase menolak untuk memasukkan Fiji Labour Party ke dalam kabinetnya, dan membatalkan implementasi beberapa putusan supremasi pengadilan yang memintanya untuk menarik beberapa putusan sampai Labour Party ditetapkan untuk bergabung dalam kabinetnya di tahun 2004. Karena anggota dalam kabinet

adalah perwakilan dari berbagai etnis menjadikan adanya kompetisi dalam kekuasaan.

Lemahnya institusi politik Fiji dalam menangani berbagai konflik politik yang berkaitan dengan masalah etnis seperti pembagian kekuasaan yang dinilai pribumi Fiji tidak merata dalam kursi di pemerintahan juga menjadi salah satu konflik yang memicu pihak militer untuk ikut campur dalam urusan politik. Campur tangan militer ini dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik etnis yang terjadi di Fiji dimana penduduk pribumi berpandangan bahwa Fiji adalah tanah airnya sendiri yang tidak diperintahkan oleh kaum imigran.

Untuk menganalisa faktor-faktor keberhasilan kudeta, penulis menggunakan konsep kudeta. Menurut Eric A. Nordlinger, kudeta adalah suatu kegiatan yang direncanakan dan dilakukan dengan sengaja untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan menyadari kemungkinan dana dan resikonya²³.

Ada beberapa hal yang biasanya digunakan pihak militer dalam menghalalkan tindakan mereka dalam menggulingkan pemerintahan, yaitu militer seringkali menuduh pemerintah yang mereka gulingkan telah gagal menjalankan tugas, tindakan yang tidak sah dan diluar kelembagaan (terutama kejahatan politik yang luas), bertanggung jawab atas kemerosotan ekonomi. Pihak militer mengatakan bahwa kudeta yang mereka lancarkan adalah bertujuan untuk menghidupkan kembali kegiatan politik, memberangus korupsi dan mewujudkan tingkat kejujuran yang tinggi di masyarakat²⁴.

²³ Nordlinger, Eric A, *Militer dalam Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal 91

²⁴ *Ibid*, hal 126

Dalam sebuah kudeta ada 3 faktor yang menentukan keberhasilan campur tangan militer, yaitu: keterlibatan aktif perwira menengah yang menduduki pos-pos strategis, anggota komplotan harus mempunyai jumlah pasukan yang memadai untuk menaklukkan penentang utama kudeta termasuk beberapa lokasi dan bangunan penting tertentu, serta ketepatan koordinasi yang merupakan unsur penting dalam pelaksanaan kudeta²⁵.

Keberhasilan pihak militer dalam melakukan kudeta 2006 di Fiji didukung adanya keterlibatan aktif perwira menengah yaitu panglima angkatan bersenjata Komodor Frank Bainimarama, selain itu, keberhasilan pihak militer melakukan kudeta didukung oleh sebanyak 5 truk yang membawa tentara bersenjata berat yang memasang blokade di jalan di sekeliling ibukota di malam hari, dan mereka menutup jalan masuk ke dalam kota. Sebelumnya pasukan tiba di satu-satunya markas besar satuan polisi bersenjata di luar Suva. Mereka membawa pergi senjata milik polisi dengan truk militer. Senjata para pengawal perdana menteri dan para menteri lainnya juga dilucuti. Pihak militer mengatakan bahwa senjata diambil dari polisi untuk memastikan senjata itu tidak digunakan untuk melawan militer, Polisi dan militer akan bekerja sama untuk memastikan keamanan dan keselamatan semua rakyat Fiji.

Faktor lain keberhasilan pihak militer Fiji dalam melakukan kudeta karena tidak adanya tentangan, baik dari pihak sipil maupun militer. Walaupun ada sejumlah pengunjuk rasa berkumpul di luar rumah perdana menteri yang digulingkan di Suva, berdoa dan menyanyikan lagu-lagu, namun mereka tidak

²⁵ *Ibid*, hal 152

melakukan perlawanan di tengah penjagaan ketat pasukan keamanan. Pihak militer juga mengeluarkan ancaman akan menghancurkan dengan cepat segala bentuk perlawanan dan menyensor secara ketat media massa di Fiji untuk mencegah munculnya sikap pro-Laisenia Qarase.

D. Hipotesa

Kudeta menjadi pola keteraturan sebagai alternatif solusi krisis di Fiji karena:

1. Ketiadaan institusi politik Fiji yang efektif seperti partai politik, parlemen dan kabinet.
2. Kuatnya posisi militer dalam sistem politik Fiji.

E. Jangkauan Penulisan

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terfokus, penulis memberikan batasan waktu, yaitu dari tahun 2000 (sejak terjadinya kudeta yang dipimpin oleh nasionalis garis keras, George Speight) sampai tahun 2006 (kudeta keempat Fiji yang dilakukan oleh pihak militer pimpinan Frank Bainimarama). walaupun demikian, berbagai hal yang terjadi sebelum tahun 2000 akan dijadikan bahan acuan.

F. Sistematika Penulisan

Bab I: Berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penulisan dan sistematika penulisan.

Bab 2: Memberikan deskripsi tentang letak geografi, demografi, institusi politik Fiji, partai politik dan militer Fiji

Bab 3: Mendeskripsikan tentang kudeta militer Fiji dari tahun 1987 – 2006.

Bab 4: Memberikan analisis tentang faktor-faktor penyebab kudeta dan faktor faktor keberhasilan kudeta Fiji 2006.

Bab 5: Berupa kesimpulan.